



ARTIKEL

Model Inovasi Pengembangan Pemberdayaan Pemuda

Studi Kasus di Kabupaten Banyumas

Innovation Model for Youth Empowerment Development

A Case Study in Banyumas Regency

OPEN ACCESS

Sitasi: Indiahono, D., Tobirin, T., Rohmi, K., & Ranjani, R. (2026). Model Inovasi Pengembangan Pemberdayaan Pemuda: Studi Kasus di Kabupaten Banyumas. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 10(1), 73–86. <https://doi.org/10.21787/mp.10.1.2026.73-86>

Dikirim: 8 April 2026

Diterima: 22 Mei 2026

Diterbitkan: 30 Mei 2026

© Penulis



Artikel ini dilisensikan di bawah lisensi [Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Kata Kunci: pemberdayaan pemuda, pembangunan desa, inovasi sosial, *multistakeholder*.

Dwiyanto Indiahono ¹, Tobirin ², Khayu Rohmi ³, Ranjani ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah 53123

dwiyanto.indiahono@unsoed.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model inovasi pemberdayaan pemuda dalam konteks pembangunan desa di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Urgensi penelitian ini didasari oleh fakta demografis bahwa lebih dari 52% populasi Indonesia berasal dari generasi milenial dan Gen Z, namun partisipasi mereka dalam pembangunan pedesaan sering kali terhambat oleh keterbatasan akses dan kurangnya ekosistem yang mendukung. Sebagai aset strategis, potensi pemuda perlu diaktivasi melalui model yang mengintegrasikan pendekatan *multistakeholder*, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan modal sosial-ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang mendalam. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, observasi lapangan, serta analisis komprehensif terhadap dokumen kebijakan daerah. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa fragmentasi program antar-lembaga menjadi hambatan terbesar dalam pemberdayaan pemuda desa. Sebagai solusinya, penelitian ini mengusulkan Model 4 Pilar (penguatan kapasitas, akses modal, ekosistem inovasi teknologi, dan partisipasi tata kelola) yang didukung oleh sinergi Pentahelix serta infrastruktur digital untuk memangkas kesenjangan kota dan desa. Implementasi model strategis ini terbukti krusial untuk mentransformasi pemuda menjadi penggerak ekonomi lokal demi mewujudkan pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan.

Abstract: *This study aims to develop a model for youth empowerment innovation in the context of rural development in Banyumas Regency, Central Java. The urgency of this study stems from the demographic fact that more than 52% of Indonesia's population consists of Millennials and Gen Z, yet their participation in rural development is often hindered by limited access and a lack of a supportive ecosystem. As a strategic asset, the potential of young people needs to be harnessed through a model that integrates a multistakeholder approach, the use of digital technology, and the strengthening of socio-economic capital. This study employs a qualitative method using an in-depth case study approach. Data were collected through interviews with various stakeholders, field observations, and a comprehensive analysis of local policy documents. The main finding of this research reveals that institutional program fragmentation is the primary barrier to rural youth empowerment. To address this, the study proposes a 4-Pillar Model (capacity building, resource and capital access, a tech-based innovation ecosystem, and governance participation) driven by Pentahelix synergy and digital infrastructure to bridge the urban-rural divide. Implementing this strategic model is*

Keywords: *youth empowerment, village development, social innovation, multistakeholder.*

crucial to transforming rural youth into drivers of the local economy and achieving self-reliant, sustainable village development.

1. Pendahuluan

Pemuda merupakan elemen kunci dengan pengaruh signifikan dalam setiap upaya gerakan nasional (Yunas & Nailufar, 2021). Pemuda di Kabupaten Banyumas memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat dan desa. Jaringan kolaborasi antar desa merupakan ciri khas struktur masyarakat pedesaan di Indonesia, yang berkontribusi pada upaya peningkatan kesejahteraan. Pemanfaatan sumber daya lokal melalui sinergi ini diyakini dapat mempercepat pembangunan di tingkat regional (Manaf et al., 2018; Susanti & Erlin, 2025; Zhou et al., 2021). Dengan lebih dari 52% penduduk Indonesia berasal dari generasi milenial dan Gen Z, mereka mewakili sumber daya manusia yang signifikan dengan potensi besar untuk mempercepat pembangunan regional. Di Kabupaten Banyumas, pemberdayaan pemuda seringkali terhambat oleh berbagai kendala, mulai dari kurangnya dukungan pemerintah hingga terbatasnya partisipasi aktif pemuda dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa.

Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam pemberdayaan pemuda di Kabupaten Banyumas adalah kurangnya dukungan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Banyumas dianggap belum cukup memperhatikan peran kaum muda dalam pembangunan desa. Seperti yang dinyatakan oleh beberapa informan, salah satunya adalah Informan 002 yang menyatakan: "Pemerintah harus meluncurkan program yang dapat mendorong partisipasi aktif kaum muda dalam pembangunan lingkungan dan desa mereka." Meskipun sudah ada beberapa program pemberdayaan pemuda, keterbatasan alokasi anggaran dan komunikasi yang tidak efektif antar pemangku kepentingan merupakan hambatan utama dalam pelaksanaannya.

Kaum muda di Indonesia, khususnya Generasi Z, dikenal memiliki literasi digital yang tinggi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi baru. Dalam konteks pemberdayaan pemuda di Banyumas, kaum muda harus dibekali dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman, seperti literasi digital, kepemimpinan, dan kewirausahaan. Selain itu, menciptakan keseimbangan antara kehidupan dan kepuasan kerja menjadi penting diperhatikan, karena keseimbangan kehidupan kerja dan kepuasan kerja secara bersama-sama memengaruhi loyalitas karyawan Gen-Z (Patadungan & Octavia, 2025), yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas mereka dalam pembangunan desa.

Pemberdayaan pemuda yang efektif membutuhkan pendekatan multi-pemangku kepentingan, yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, bank, media, dan akademisi. Pendekatan ini penting untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya berbasis pada kebutuhan lokal tetapi juga dapat mengakomodasi berbagai sektor yang dapat mendukung pemberdayaan pemuda. Kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan penting dalam mengelola program pemberdayaan yang efektif, serta menyediakan akses ke sumber daya keuangan dan teknologi (Safriada et al., 2022).

Berdasarkan data lapangan, tantangan terbesar bagi pemberdayaan pemuda di Kabupaten Banyumas adalah kurangnya pemahaman tentang potensi mereka sendiri. Hambatan yang dihadapi generasi muda saat ini telah berubah menjadi neokolonialisme (Muttaqin & Wahyun, 2019). Fenomena ini dipicu oleh kapitalisme dan neoliberalisme, yang membentuk pola pikir hedonistik dan pragmatis melalui industri makanan, hiburan, mode, dan film. Situasi ini diperparah oleh arus informasi

digital yang tak terbandung, yang memfasilitasi internalisasi nilai-nilai ini ke dalam konstruksi sosial kaum muda.

Hal yang krusial lainnya adalah banyak anak muda merasa suara mereka tidak didengar dalam perencanaan pembangunan desa, dan seringkali hanya digunakan sebagai formalitas dalam Rapat Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa). Padahal keterlibatan aktif masyarakat merupakan syarat mutlak untuk keberhasilan program pembangunan di daerah pedesaan (Dulkiah et al., 2023; Ironbar & Anam, 2024). Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan model pemberdayaan berdasarkan potensi pemuda dan menyediakan program yang dapat mengoptimalkan peran mereka dalam pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat adalah kunci utama keberlanjutan dan penerimaan publik terhadap implementasi program (Andersson et al., 2023; Sieber et al., 2024; Vignola et al., 2009).

Konsep Pemberdayaan, yang awalnya diperkenalkan oleh UNDP dalam kerangka keadilan lingkungan, mewakili sinergi antara pendekatan *bottom-up* dan *top-down* (Khoday et al., 2014). Instrumen pemberdayaan ini mencakup berbagai strategi untuk meningkatkan otonomi masyarakat dan keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan (Laverack & Wallerstein, 2001). Penting untuk dicatat bahwa pemberdayaan bukanlah entitas yang terpisah dari partisipasi, melainkan hasil jangka panjang dari proses partisipatif. Berbeda dengan alat partisipasi umum, pemberdayaan secara khusus berfokus pada penguatan pengaruh kolektif, otoritas politik, dan kendali atas sumber daya untuk mempercepat transisi sosial-ekologis dan ketahanan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kerja fleksibel berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja dan keseimbangan kerja-hidup (Indradewa & Ayung, 2023). Oleh karena itu pekerjaan fleksibel dan nilai-nilai kerja yang selaras dengan aspirasi kaum muda dapat memperkuat hubungan mereka dengan masyarakat dan meningkatkan produktivitas dalam pembangunan desa. Program pemberdayaan harus mempertimbangkan karakteristik kaum muda, seperti kecintaan mereka terhadap teknologi dan keinginan untuk berkontribusi pada perubahan sosial.

Sebagai langkah awal, dibutuhkan model pengembangan pemberdayaan pemuda berbasis modal manusia dan sosial, yang mengintegrasikan kebijakan pemerintah, dukungan sektor swasta, dan partisipasi aktif pemuda. Sebagai penggerak awal, pemuda memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan regional, yang menjadi landasan untuk mencapai target nasional (Pinilas et al., 2017). Model ini harus mempertimbangkan penggunaan teknologi dalam pemberdayaan (Isnaini et al., 2024; Rahmiyati et al., 2015), seperti yang dicontohkan oleh Desa Desainer Grafis dan Desa Pemasar Online (Indiahono, 2022). Pemberdayaan berdasarkan model ini diyakini memiliki dampak yang lebih besar terhadap keberlanjutan pembangunan desa di Banyumas.

Keberhasilan pemberdayaan pemuda di Banyumas dapat diukur melalui kebijakan berbasis bukti yang melibatkan evaluasi dan pemantauan hasil secara sistematis. Kebijakan berbasis bukti akan membantu menilai efektivitas program, pengelolaan anggaran, pengawasan implementasi, dan pencapaian hasil yang diharapkan (Hantrais et al., 2015; Jabali et al., 2024; Pellegrini, 2021). Model kebijakan ini bertujuan tidak hanya untuk mengukur hasil tetapi juga untuk memastikan bahwa program yang diimplementasikan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pemuda dan masyarakat desa.

Kabupaten Banyumas terletak di Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah sekitar 1.275,52 km² dan jumlah penduduk sekitar 1,8 juta jiwa (BPS Kabupaten Banyumas, 2023). Kabupaten ini memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama di kalangan pemuda. Menurut data dari Badan Pusat Statistik

(BPS) Kabupaten Banyumas, angka kemiskinan pada tahun 2023 mencapai sekitar 12,7%, yang berarti sekitar 228.000 orang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat, terutama di kalangan pemuda, untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Pemuda di Kabupaten Banyumas, yang berjumlah sekitar 40% dari total penduduk (BPS Kabupaten Banyumas, 2023), memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada perubahan sosial dan ekonomi di desa mereka.

Meskipun terdapat berbagai program pemerintah untuk mendukung pemberdayaan pemuda, seperti Karang Taruna dan forum pemuda lainnya, banyak pemuda mengeluhkan kurangnya koordinasi dan alokasi anggaran yang memadai. Selain itu, terbatasnya kesempatan kerja di desa juga menjadi kendala utama. Beberapa pemuda mengungkapkan bahwa mereka seringkali hanya digunakan sebagai formalitas dalam perencanaan pembangunan desa tanpa dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang lebih substansial. Oleh karena itu, pergeseran struktur ekonomi harus dipantau secara ketat, terutama terkait implikasinya terhadap ketersediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan di daerah pedesaan (Kristriantono & Yuliawati, 2022).

Pemuda memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada berbagai sektor pembangunan pedesaan, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Pemuda di desa-desa Banyumas telah menunjukkan kemampuan mereka untuk mengembangkan berbagai program berbasis teknologi, seperti pengembangan desa wisata, pertanian berbasis teknologi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Generasi Z, yang merupakan mayoritas pemuda di Banyumas, dikenal memiliki keterampilan digital yang lebih baik daripada generasi sebelumnya, sehingga memungkinkan mereka untuk berperan dalam ekonomi digital. Diperlukan model pemberdayaan pemuda yang komprehensif dan inovatif dengan mengintegrasikan modal manusia, sosial, serta teknologi digital. Program ini harus menyesuaikan diri dengan karakteristik kaum muda, seperti kebutuhan akan kerja fleksibel dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas serta kontribusi sosial mereka dalam pembangunan desa.

SDGs, yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa terdiri dari 17 target strategis dan ratusan indikator pencapaian. Fokus utama mereka adalah memobilisasi tindakan konkret di seluruh dunia untuk mengatasi krisis planet dan sosial (Albert et al., 2023). Hal ini dicapai melalui upaya terpadu untuk memberantas kemiskinan, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memastikan kemakmuran bagi semua lapisan masyarakat (Moallemi et al., 2020). Konsep pembangunan berkelanjutan, yang diperkenalkan oleh Komisi Brundtland (Brundtland & Khalid, 1987), menekankan pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang melalui keseimbangan tiga dimensi utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara khusus, Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya transformasi ekonomi hijau yang menuntut penciptaan green jobs yang mendukung keberlanjutan lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan (Mariska, 2024). Sementara dimensi sosial menargetkan pengurangan ketidaksetaraan melalui akses yang sama terhadap layanan dasar (Nabilah et al., 2025; UNDP, 2025). Di sisi lain, keberlanjutan lingkungan membutuhkan pengelolaan sumber daya yang bijaksana dan adopsi teknologi ramah lingkungan.

Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, diperlukan pergeseran paradigma menuju pendekatan partisipatif dan berbasis bukti. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menyeimbangkan hubungan kekuasaan (Chambers, 1997), sementara (Hossin et al., 2025; Yuliani et al., 2025) lebih menyoroti pentingnya bukti, dan pemanfaatan big data untuk kebijakan yang lebih objektif dan efisien. Dalam praktiknya, keterlibatan aktif kaum muda dalam perencanaan telah terbukti meningkatkan relevansi program. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pemuda berkontribusi positif terhadap kemajuan desa, meningkatkan hubungan sosial dan inovasi (Tanjung et al., 2024), yang kemudian harus didukung oleh evaluasi terstruktur untuk mengukur dampak kebijakan secara akurat. Kompleksitas tantangan pembangunan ini membutuhkan kolaborasi multi-pemangku kepentingan yang mensinergikan berbagai sektor (Sachs, 2015). Sinergi antara pemerintah dan masyarakat memastikan kebijakan yang responsif, sementara sektor swasta memainkan peran penting dalam menyediakan modal dan peluang kerja. Peran ini diperkuat oleh akademisi melalui transfer teknologi yang tepat (Good et al., 2019) dan media, yang berfungsi sebagai pilar transparansi dan publikasi keberhasilan program (Meier & Trappel, 2022). Pada akhirnya, keberhasilan implementasi program bergantung pada komitmen lintas sektor dan alokasi sumber daya yang memadai (Syamsuadi et al., 2023). Percepatan pencapaian tujuan juga dapat didorong melalui integrasi teknologi, di mana keterlibatan kaum muda yang adaptif terhadap inovasi digital merupakan kunci strategis untuk memecahkan masalah pembangunan pedesaan (Aris, 2025).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diketahui bahwa penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya gap empiris berupa tingginya potensi digital Gen Z di Kabupaten Banyumas (40% populasi) yang belum optimal dan terjebak dalam formalitas Musrenbangdesa akibat fragmentasi program, keterbatasan anggaran, serta tantangan neokolonialisme digital. Untuk mengatasi kesenjangan konseptual tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan struktural-kultural sekaligus mengonseptualisasikan Model Kontemporer 4 Pilar Utama (penguatan kapasitas, akses modal, ekosistem inovasi, dan tata kelola desa). Kebaharuan model ini terletak pada integrasi taktis berbasis bukti (*evidence based*) yang mensinergikan ekosistem Pentahelix dengan karakter adaptif pemuda, guna mentransformasi peran mereka dari sekadar objek administratif menjadi subjek penggerak ekonomi demi mempercepat pencapaian SDGs Desa.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang dilakukan di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi dipilih berdasarkan tingginya populasi pemuda (generasi milenial dan Gen Z mencapai >52%) dan kompleksitas tantangan pemberdayaan pemuda yang representatif. Penelitian ini dilakukan bekerja sama dengan Komunitas Pemuda Teras Nara Cendekia, Purwojati, Kabupaten Banyumas. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang dikombinasikan dengan *Snowball Sampling* untuk menjangkau pemangku kepentingan kunci. Kriteria informan adalah individu yang terlibat langsung, memiliki otoritas, atau terdampak oleh kebijakan pemberdayaan pemuda di Banyumas. Total informan berjumlah 22 orang. Pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam dan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan total 22 pemuda yang aktif terlibat dalam kegiatan pemuda berbasis komunitas. Wawasan, pengalaman, dan perspektif yang diperoleh dari wawancara dan FGD menjadi dasar utama untuk analisis data dan perumusan kesimpulan dalam penelitian ini. Dengan mengintegrasikan pendekatan kualitatif ini, penelitian ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual tentang isu-isu yang diteliti. Analisis data menggunakan model interaktif (Miles et al., 2014), yang terdiri dari tiga tahap: kondensasi data (seleksi, penyederhanaan, dan pengkodean data), presentasi data (matriks, diagram, dan narasi), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Analisis tematik dilakukan dengan bantuan perangkat lunak NVivo atau Atlas.ti untuk mengidentifikasi pola, tema, dan sub-tema yang muncul dari data. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi multi-dimensi: triangulasi sumber (membandingkan

data pemuda, pemerintah, dan swasta), triangulasi metode (*cross check* wawancara dengan hasil FGD), serta member checking (mengembalikan draf transkrip dan draf model kepada informan kunci untuk memastikan kesesuaian interpretasi). Penelitian ini mengikuti prinsip-prinsip etika penelitian yang meliputi persetujuan berdasarkan informasi, kerahasiaan, anonimitas, kemurahan hati, dan keadilan. Hasil analisis akan digunakan untuk mengembangkan Model Inovasi Pengembangan Pemberdayaan Pemuda.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kurangnya Dukungan Pemerintah untuk Pemberdayaan Pemuda

Temuan menunjukkan bahwa peran pemerintah distrik dalam memberdayakan kaum muda, khususnya mereka yang menunjukkan kepedulian dan keterlibatan aktif dalam pembangunan desa, masih belum optimal. Terlepas dari meningkatnya harapan yang diletakkan pada pemerintah daerah untuk memberikan perhatian, dukungan, dan arahan strategis yang lebih besar bagi inisiatif kaum muda, kondisi empiris mengungkapkan kesenjangan yang terus-menerus antara aspirasi kebijakan dan implementasi praktis. Perbedaan ini menunjukkan bahwa program dan upaya kelembagaan yang ada belum sepenuhnya mengatasi kebutuhan, potensi, dan tantangan yang dihadapi kaum muda di tingkat akar rumput. Lebih lanjut, kurangnya keterlibatan, fasilitasi, dan alokasi sumber daya yang konsisten dari otoritas distrik tampaknya menghambat pengembangan partisipasi kaum muda yang bermakna dalam tata kelola desa dan proses pembangunan.

Dalam banyak kasus, inisiatif kaum muda cenderung sangat bergantung pada motivasi diri dan upaya berbasis komunitas daripada dukungan pemerintah yang terstruktur. Situasi ini menggarisbawahi urgensi untuk intervensi kebijakan yang lebih proaktif, inklusif, dan berkelanjutan yang dapat secara efektif menjembatani kesenjangan antara harapan pemerintah dan realitas di lapangan. Kekhawatiran ini secara eksplisit diungkapkan oleh Informan 002, yang menekankan pentingnya inisiatif yang dipimpin pemerintah dalam merangsang dan mempertahankan partisipasi pemuda. Menurut informan, tanpa arahan kebijakan yang jelas, mekanisme dukungan yang memadai, dan dorongan terus-menerus dari pemerintah daerah, keterlibatan pemuda berisiko menjadi sporadis dan kurang berdampak, sehingga membatasi potensi kontribusinya terhadap pembangunan desa jangka panjang.

“Pemerintah harus meluncurkan program-program yang dapat mendorong partisipasi aktif kaum muda dalam pembangunan lingkungan dan desa mereka. Program-program ini diperlukan agar potensi dan keterampilan yang dimiliki kaum muda dapat diakomodasi dan disalurkan dengan tepat. Selain itu, para pembuat kebijakan perlu meningkatkan kemampuan mereka untuk memahami potensi dan preferensi kaum muda sehingga pemberdayaan dapat dilakukan dengan lebih tepat dan efektif.” (Informan 002)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemahaman para pembuat kebijakan tentang preferensi kaum muda masih perlu ditingkatkan. Sejalan dengan hal ini, Informan 003 mengakui bahwa meskipun program pemberdayaan tersedia, skalanya masih belum memadai. Ia menyatakan, “Saat ini, program yang diluncurkan oleh pemerintah daerah untuk pemberdayaan kaum muda memang ada, tetapi cakupannya masih sangat terbatas.”

Cakupan yang terbatas ini mengakibatkan pengecualian dari partisipasi, di mana hanya segelintir kaum muda dalam organisasi formal yang mendapatkan akses, sementara potensi besar kaum muda di desa-desa terpencil tetap belum dimanfaatkan. Lebih lanjut, sinergi lintas sektor diperlukan untuk mengatasi keterbatasan ini. Informan 011 menyarankan integrasi program di berbagai tingkatan pemerintahan. Integrasi ini sangat penting untuk menghindari duplikasi program dan memastikan keberlanjutan pembangunan kapasitas (transfer pengetahuan) dari tingkat pusat hingga tingkat desa:

“Diperlukan program terpadu yang melibatkan pemerintah distrik, provinsi, dan pusat, serta mengundang perwakilan pemuda dari setiap desa. Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dan keterampilan kaum muda.”
(Informan 011)

Secara umum, upaya pemerintah daerah dalam memberdayakan pemuda desa dinilai belum efektif karena komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan yang lemah, sehingga menyebabkan implementasi program terfragmentasi dan sulit menjangkau tingkat akar rumput. Selain itu, keterbatasan alokasi anggaran mengakibatkan program sering kali bersifat jangka pendek dan seremonial daripada terstruktur. Akibatnya, inisiatif pemberdayaan ini gagal memberikan hasil terukur serta manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat desa. Ketiadaan mekanisme pendanaan yang memadai dan berkelanjutan semakin memperburuk masalah ini, karena membatasi peluang untuk peningkatan kapasitas, pengembangan kewirausahaan, dan keterlibatan masyarakat jangka panjang di kalangan pemuda. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu segera tidak hanya meningkatkan alokasi anggaran tetapi juga merancang strategi pemberdayaan yang lebih terintegrasi, konsisten, dan berorientasi pada keberlanjutan yang dapat menghasilkan dampak nyata dan berkelanjutan pada pembangunan desa.

Pada konteks ini, perlu kesadaran bahwa meningkatkan modal manusia (pemuda) dan modal sosial (komunitas pemuda) menjadi amat penting dalam pembangunan desa. Sebab pembangunan masyarakat ditentukan oleh kombinasi berbagai modal dasar; namun, efektivitas pembangunan meningkat ketika modal sosial dan modal manusia diperkuat karena keduanya memungkinkan masyarakat mengelola modal lainnya secara lebih produktif. Dalam kerangka kehidupan berkelanjutan, aset tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi dan digunakan secara kombinatorial sesuai konteks sosial-ekonomi masyarakat (Serageldin, 1996).

3.2. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa

Secara demografis, kaum muda merupakan kelompok usia mayoritas di Indonesia. Generasi milenial dan Generasi Z mencakup 52 persen dari total populasi nasional. Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam pembangunan merupakan suatu kebutuhan. Dalam konteks Kabupaten Banyumas, potensi beragam daerah merupakan aset penting yang perlu dikelola melalui pembangunan manusia. Berkaitan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, terdapat dua pilar utama yang harus diperkuat: 1) Modal Manusia, yang meliputi peningkatan keterampilan, pendidikan, dan kesehatan kaum muda agar mereka dapat bersaing di pasar kerja; dan 2) Modal Sosial, yang meliputi jaringan, kepercayaan, dan kerja sama timbal balik antar kaum muda dalam membangun komunitas desa.

Oleh karena itu, pembangunan manusia di kalangan generasi muda sangat penting untuk dibahas, karena bonus demografis tidak akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan jika generasi muda tidak produktif. Hal ini menimbulkan tantangan karena ketika kaum muda tidak produktif, mereka tidak menjadi generasi yang mendukung generasi tua dan muda, tetapi malah menjadi beban bagi generasi tua dan muda. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma—dari sekadar menjadi “objek pembangunan” menjadi “subjek pembangunan.” Ada harapan besar bahwa generasi muda di Kabupaten Banyumas tidak hanya menjadi penonton dalam kebijakan publik, tetapi akan tumbuh menjadi aktor yang berdaya (mandiri), produktif (menghasilkan nilai tambah), dan inovatif (mampu menciptakan solusi untuk masalah lokal).

Generasi Z dikenal sebagai generasi yang malas, tetapi di balik itu, mereka adalah generasi yang mengidentifikasi diri sebagai generasi yang paling gila kerja. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa jumlah remaja yang bekerja paruh waktu di Amerika Serikat pada tahun 2023 adalah yang tertinggi sejak tahun 2009. Kaum muda di Jepang yang bekerja, termasuk mereka yang enggan mengambil cuti karena takut membebani rekan kerja jika mereka tidak masuk kerja. Pada tahun 2023, Perdana Menteri Jepang bahkan ingin merancang pembatasan jam lembur bagi pekerja di Jepang. Ini karena banyak orang yang gila kerja. Negara lain mungkin memiliki fenomena yang berbeda, tetapi optimisme bahwa kaum muda dapat bergerak sejalan dengan dinamika generasi mereka patut diupayakan. Preferensi kesejahteraan subjektif Gen Z dipengaruhi oleh setidaknya dua hal: sikap mereka terhadap pekerjaan dan nilai-nilai yang berlaku di tempat kerja (Tang et al., 2020). Pengaturan kerja fleksibel memiliki pengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi, keseimbangan kehidupan kerja, dan kepuasan kerja (Christian et al., 2024). Bagi Generasi Z, keseimbangan kerja-hidup dapat memengaruhi kinerja mereka (Wahyu et al., 2024). Berdasarkan data ini, proses pemberdayaan komunitas pemuda juga harus mempertimbangkan sifat pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keseimbangan kerja-hidup mereka.

Generasi Z merupakan *digital native* yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap teknologi dan akses internet yang luas. Hal ini menjadikan mereka sebagai sumber daya manusia unggul yang lebih berpengetahuan dan memiliki tingkat literasi lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Pemberdayaan komunitas pemuda pada tingkat ideal harus memberikan bukti tentang bagaimana kebijakan pemberdayaan harus diimplementasikan. Oleh karena itu, pada tahap ini, kerangka kebijakan berbasis bukti didemonstrasikan.

Kebijakan yang baik tidak cukup hanya dirancang secara normatif, tetapi harus diuji melalui penilaian program, pengawasan implementasi, pemantauan hasil, dan evaluasi yang terukur. Dengan demikian, setiap keputusan kebijakan tidak berdiri di atas asumsi, melainkan pada bukti yang menunjukkan apakah suatu program benar-benar efektif, efisien, dan relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Pendekatan seperti ini sejalan dengan literatur yang menekankan bahwa *evidence-based policy* membantu pembuat kebijakan mengambil keputusan yang lebih baik dan mencapai hasil yang lebih baik pula.

Secara lebih rinci, jika merujuk pada (Landingham et al., 2014) bagian penilaian program menunjukkan tahap awal untuk menelaah apakah suatu program memiliki dasar efektivitas yang kuat dan layak diteruskan. Tahap pengembangan anggaran menggambarkan bahwa alokasi dana seharusnya tidak hanya mengikuti kebiasaan atau tekanan politik, melainkan disusun berdasarkan bukti mengenai program mana yang paling memberi manfaat. Selanjutnya, pengawasan implementasi menegaskan pentingnya memastikan bahwa program dijalankan sesuai rencana, prosedur, dan

target yang telah ditetapkan. Setelah itu, pemantauan hasil digunakan untuk melihat apakah pelaksanaan program benar-benar menghasilkan *output* dan *outcome* yang diharapkan. Akhirnya, evaluasi terukur menjadi alat untuk menilai secara kritis apakah program tersebut pantas dipertahankan, diperbaiki, atau dihentikan. Rangkaian ini menunjukkan bahwa kebijakan berbasis bukti bekerja sebagai satu siklus yang saling terhubung, bukan tahapan yang berdiri sendiri.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, model kebijakan berbasis bukti (Landingham et al., 2014) ini juga menekankan bahwa kebijakan publik yang efektif memerlukan hubungan yang erat antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Kebijakan berbasis bukti memungkinkan pemerintah menggunakan informasi yang valid untuk menyusun prioritas, mengarahkan sumber daya secara lebih tepat, serta meminimalkan pemborosan anggaran. Selain itu, pendekatan ini memperkuat akuntabilitas karena hasil kebijakan dapat diukur secara lebih jelas. Karena itu, kebijakan tidak hanya menunjukkan konsep teoritis, tetapi juga menggambarkan prinsip praktis bahwa kebijakan publik harus terus disempurnakan melalui bukti empiris, pemantauan berkelanjutan, dan evaluasi hasil. Apabila digunakan dalam tulisan akademik, gambar ini dapat diposisikan sebagai ilustrasi bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menjadikan bukti sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pengembangan kebijakan berbasis bukti (Landingham et al., 2014) dalam konteks Pengembangan Kebijakan Komunitas Pemuda dapat dikembangkan melalui:

1. Penilaian Program

Menilai apakah kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dan mengevaluasi efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks pengembangan komunitas pemuda, proyek percontohan yang digunakan sebagai model harus dapat diprediksi dan diimplementasikan, dan harus jelas bagaimana program tersebut akan diimplementasikan untuk mencapai tujuannya secara efektif.

2. Pengembangan Anggaran

Memberikan bukti bahwa dana yang dialokasikan akan dikembalikan dengan dampak kebijakan tersebut. Dalam konteks pengembangan komunitas pemuda, perspektif program pengentasan kemiskinan harus diperhitungkan, dengan mempertimbangkan jumlah pendanaan pemerintah yang dihabiskan untuk proyek percontohan hingga tingkat desa. Meskipun masalah anggaran harus ditangani pada tahap perencanaan (Ahuja et al., 1994), dukungan keuangan tetap berisiko dihentikan jika pemantauan rutin menunjukkan bahwa pemilik proyek kredit melebihi batas risiko yang ditetapkan oleh lembaga keuangan. Oleh karena itu, akuntabilitas anggaran dapat digunakan sebagai bukti bahwa kebijakan tersebut memang layak untuk diimplementasikan oleh pemerintah.

3. Pemantauan Pelaksanaan

Memastikan program dapat terlaksana secara efektif bagi kelompok sasaran. Dalam konteks pengembangan masyarakat pemuda, ketika proyek percontohan dilaksanakan, pemerintah harus mempelajari secara menyeluruh apa yang akan terjadi ketika kebijakan ini diterapkan. Masalah yang muncul di lapangan dicatat dan solusi dicari, sehingga ketika diimplementasikan atau direplikasi di masyarakat pemuda di desa-desa, pemerintah sudah mengetahui jawaban atas masalah yang dihadapi di lapangan.

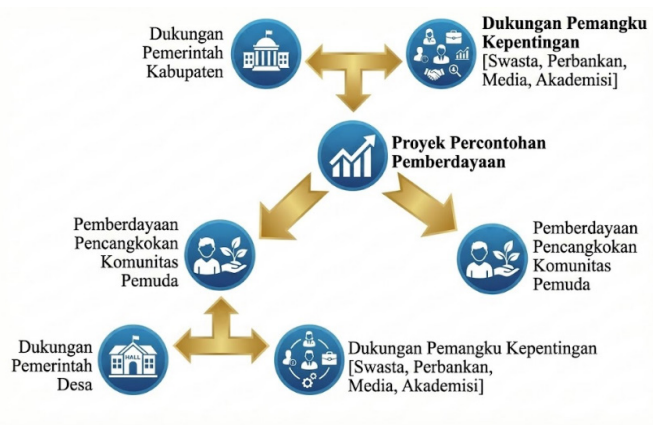
4. Pemantauan Hasil

Memastikan program dapat dikembangkan untuk mencapai hasil yang telah ditentukan. Dalam konteks pengembangan masyarakat pemuda, proyek percontohan juga harus mampu mempelajari cara mengukur efektivitas program. Ketika proyek percontohan dilaksanakan, penyimpangan pada kelompok sasaran dan lembaga pelaksana dapat dipelajari sehingga dapat dikoreksi sesuai dengan pedoman program. Pemantauan harus dilakukan ketika proyek percontohan dilaksanakan dan ketika program diimplementasikan di kelompok sasaran.

5. Evaluasi Sasaran

Melakukan evaluasi ketat terhadap program yang tidak memiliki bukti efektivitas yang kuat. Indikator keberhasilan program dirancang dan disimulasikan dengan baik untuk kelompok proyek percontohan, sehingga ketika program diimplementasikan, indikator dan instrumen pengukuran dapat digunakan tanpa coba-coba. Faktor-faktor yang tidak dianggap memiliki dampak signifikan terhadap hasil dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan.

Berdasarkan informasi dari berbagai informan, diketahui bahwa pemberdayaan pemuda di desa saat ini dinilai belum optimal karena keterlibatan mereka dalam Musrenbangdesa masih sebatas formalitas, padahal aspirasi mereka sangat penting untuk dijadikan acuan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan model pengembangan komunitas yang berbasis multi-pemangku kepentingan dengan melibatkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, perbankan, media, dan akademisi. Kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan urusan publik menjadi kunci utama, sebagaimana terbukti dalam efektivitas layanan publik selama masa pandemi untuk menjaga ketahanan sosial ekonomi masyarakat.



Gambar 1. Model Pemberdayaan Komunitas Pemuda.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Sebagai pemerintah daerah dengan sumber daya yang lebih besar, Pemerintah distrik harus mengambil peran sentral sebagai katalis dan fasilitator dalam pemberdayaan pemuda dengan mengelola proyek percontohan yang berfungsi sebagai laboratorium inovasi. Program ini harus disinkronkan dengan potensi lokal, seperti fokus pada ekonomi kreatif digital bagi pemuda dengan literasi digital tinggi, serta melibatkan kolaborasi aktif antara pemerintah desa, sektor swasta, perbankan, media, dan akademisi. Keberhasilan komunitas pemuda dalam membangun desa tematik (seperti Desa Desainer Grafis atau Desa Film) (Indiahono, 2022) membuktikan bahwa efektivitas proyek percontohan tersebut sangat dipengaruhi oleh dukungan teknologi dan sinergi lintas pemangku kepentingan.

Keterampilan kepemimpinan transformasional juga harus menjadi bagian penting dari proyek percontohan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini karena kepemimpinan transformasional cenderung memiliki dampak positif yang kuat terhadap kinerja inovasi melalui berbagi pengetahuan (Rosyadi & Indiahono, 2020; Zheng et al., 2017). Lebih lanjut, kepemimpinan transformasional dapat menginspirasi pergeseran visi dan menumbuhkan budaya berbagi pengetahuan. Kemampuan untuk berbagi pengetahuan tacit penting dalam mengembangkan modal sosial dan kemampuan inovasi organisasi (Rastrollo-Horrillo & Rivero Díaz, 2019; Thompson, 2018). Proses seleksi peserta dalam proyek percontohan harus menggunakan kriteria yang ketat, menargetkan kaum muda yang egaliter dan komunikatif sehingga transfer pengetahuan di tingkat akar rumput dapat berjalan tanpa hambatan hierarki yang kaku.

Setelah proyek percontohan diimplementasikan dan dipelajari oleh pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, proyek tersebut dapat direplikasi di desa-desa. Replikasi ini tidak boleh terburu-buru; pendekatan bertahap diperlukan untuk mengurangi risiko dan beradaptasi dengan karakteristik unik setiap desa. Replikasi dapat dilakukan secara bertahap untuk meminimalkan kesalahan dan kegagalan. Pelajaran penting yang dipetik selama proyek percontohan sangat penting ketika mengirimkan program ke desa-desa yang menjadi sasaran program.

Ketika program ditransfer ke desa-desa, peran pemerintah desa dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan menjadi sangat penting. Hal ini karena pemerintah desa dapat memberikan dukungan berupa bantuan keuangan dan sumber daya lainnya. Sementara itu, berbagai pemangku kepentingan dapat memberikan dukungan berupa sumber daya yang spesifik bagi mereka. Bank, misalnya, dapat berpartisipasi dengan memberikan bantuan kredit mikro kepada masyarakat yang ingin memulai usaha. Akademisi dapat berperan dalam membantu implementasi teknologi yang tepat guna di kalangan pemuda, atau memperkuat transfer ilmu pertanian yang telah dilakukan. Media dapat membantu mempublikasikan produk yang dihasilkan oleh masyarakat di desa-desa. Kerja sama multi-pemangku kepentingan pada fase pencangkakan sangat penting dalam model pemberdayaan masyarakat pemuda. Kemampuan untuk menciptakan inovasi produk di setiap desa adalah kuncinya. Hal ini karena penelitian menunjukkan bahwa inovasi organisasi berdampak pada keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, penting untuk mendorong pemanfaatan potensi desa dan inovasi yang memiliki keunggulan kompetitif. Dengan mendorong kaum muda untuk secara inovatif memanfaatkan potensi lokal, desa tidak hanya akan menjadi mandiri secara ekonomi tetapi juga akan memiliki keunikan yang sulit ditiru oleh daerah lain.

4. Kesimpulan

Studi ini mengidentifikasi bahwa pemberdayaan pemuda di Kabupaten Banyumas menghadapi tantangan signifikan yang perlu diatasi melalui pendekatan terpadu dan berbasis bukti. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya dukungan dari pemerintah daerah terhadap peran pemuda dalam pembangunan desa. Meskipun terdapat berbagai program pemberdayaan, keterbatasan alokasi anggaran dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, pemberdayaan pemuda di Banyumas membutuhkan program yang lebih terstruktur yang melibatkan berbagai pihak dan berbasis bukti yang jelas.

Pemberdayaan pemuda yang efektif harus mempertimbangkan potensi generasi muda, seperti kemampuan digital yang tinggi dan kemauan untuk berinovasi. Kaum muda harus lebih terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan

pembangunan desa untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan relevan dan efektif. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan media merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi pemuda dalam pembangunan desa berkelanjutan.

Model pemberdayaan pemuda berbasis modal manusia dan modal sosial dapat memperkuat peran pemuda dalam pembangunan. Program pemberdayaan berbasis multi-pemangku kepentingan, dengan dukungan dari berbagai pihak, akan memiliki potensi yang lebih besar untuk berhasil mengatasi tantangan yang ada. Program-program yang mengintegrasikan teknologi, pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan kapasitas kepemimpinan akan mempersiapkan kaum muda dengan lebih baik untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan desa. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa stagnasi pemberdayaan pemuda di Kabupaten Banyumas dipicu oleh lemahnya dukungan struktural, keterbatasan anggaran, dan fragmentasi koordinasi lintas sektor yang menjebak partisipasi Gen Z dalam formalitas seremonial. Sebagai kontribusi utama, studi ini menghasilkan Model Pemberdayaan Komunitas Desa (dengan empat pilar: kapasitas, akses, inovasi, tata kelola) berbasis sinergi Pentahelix yang mengimplikasikan pentingnya reformasi regulasi Musrenbangdesa dan integrasi anggaran terpadu bagi Pemkab Banyumas. Meskipun memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi geografis di luar wilayah Banyumas dan belum mengukur dampak ekonomi jangka panjang secara longitudinal, model ini menawarkan peta jalan baru bagi riset lanjutan untuk menguji efektivitas transformasi pemuda desa menjadi subjek penggerak ekonomi digital demi ketercapaian SDGs Desa.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini didanai oleh Universitas Jenderal Soedirman melalui Hibah Riset Terapan Unsoed dengan nomor kontrak 26.303/UN23.35.6/PT.01/11/2024. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Komunitas Pemuda Teras Nara Cendekia yang telah bekerjasama dan membantu dalam proses penelitian.

Referensi

- Ahuja, H. H., Dozzi, S. P., & Abourizk, S. M. (1994). *Project Management: Techniques in Planning and Controlling Construction Projects*. John Wiley & Sons, Inc.
- Albert, J. S., Carnaval, A. C., Flantua, S. G. A., Lohmann, L. G., Ribas, C. C., Riff, D., Carrillo, J. D., Fan, Y., Figueiredo, J. J. P., Guayasamin, J. M., Hoorn, C., de Melo, G. H., Nascimento, N., Quesada, C. A., Ulloa Ulloa, C., Val, P., Arieira, J., Encalada, A. C., & Nobre, C. A. (2023). Human impacts outpace natural processes in the Amazon. *Science*, 379(6630), eabo5003. <https://doi.org/10.1126/science.abo5003>
- Andersson, I., Arlati, A., Bradley, S., Buijs, A., Caitana, B., Garcia-Mateo, M.-C., Hilding-Hamann, K. E., Mateus, A., Canto Moniz, G., Nunes, N., Sejdullahu, I., & Van der Jagt, S. (2023). *Guidelines for Co-Creation and Co-Governance of Nature-based Solutions – Insights from EU-funded Projects* (I. Ferreira, L. Gerd, & I. Mahmoud (eds.)). Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2777/157060>
- Aris, S. (2025). The Role of Generation Z in Village Development Through Digital Technology Innovation. *Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 06(01), 828–848.
- Brundtland, G. H., & Khalid, M. (1987). *World Commission on Environment and Development: Our Common Future*. Oxford University Press.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts?: Putting the First Last*. Intermediate Technology Publications.
- Christian, J., Nainggolan, M., & Purba, S. D. (2024). Enhancing Gen Z Employees Commitment Through Flexible Work Arrangements, Work-Life Balance, and Job Satisfaction. *Jurnal Manajemen*, 21(2), 132–157. <https://doi.org/10.25170/jm.v21i2.6174>
- Dulkiah, M., Simon, C., Widoyo, H., Brontowiyono, W., Ruhana, F., & Sapiro, R. (2023). Community Participation Forms in Indonesian Villages to Support the Sustainable Development Goals Program. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(11), 1–24. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.2061>
- Good, M., Knockaert, M., Soppe, B., & Wright, M. (2019). The technology transfer ecosystem in academia. An organizational design perspective. *Technovation*, 82–83, 35–50. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2018.06.009>

- Hantrais, L., Lenihan, A. T., & MacGregor, S. (2015). Evidence-based policy: exploring international and interdisciplinary insights. *Contemporary Social Science*, 10(2), 101–113. <https://doi.org/10.1080/21582041.2015.1061687>
- Hossin, A., Du, J., Mu, L., & Asante, I. O. (2025). *Big Data-Driven Public Policy Decisions : Transformation Toward Smart Governance*. 1–19. <https://doi.org/10.1177/21582440231215123>
- Indiahono, D. (2022). Designing Policies to Stimulate the Digital Creative Economy for Millennials and Generation Z. *KnE Social Sciences*, 2022, 86–94. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.10929>
- Indradewa, R., & Ayung, A. (2023). The influence of flexible working arrangements and work-life balance on job satisfaction : A double-layered moderated mediation model. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 26(2), 449–476. <https://doi.org/10.24914/jeb.v26i2.9551>
- Ironbar, V. E., & Anam, B. E. (2024). Community Participation and its Impact on Rural Project Sustainability in Akpabuyo Local Government Area, Cross River State, Nigeria. *International Journal of Strategic Research in Public Administration and Organizational Process*, 4(1), 278–289. <https://doi.org/10.48028/iiprds/ijsrpaop.v4.i1.18>
- Isnaini, F., Aqna, D., Mulyono, M., & Diponegoro, U. (2024). Economic Digitalization for Community Empowerment: A Literature Review. *Research Horizon*, 4(6), 373–380. <https://doi.org/10.54518/rh.4.6.2024.432>
- Jabali, S. H., Yazdani, S., Poursaghari, H., & Maleki, M. (2024). From bench to policy: a critical analysis of models for evidence-informed policymaking in healthcare. *Frontiers in Public Health*, Volume 12-2024. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1264315>
- Khoday, K., Inglis, S., Hussein, S., Scott, T., & Raine, A. (2014). *Environmental Justice: Comparative Experiences in Legal Empowerment* (Issue June). <https://www.undp.org/publications/environmental-justice-comparative-experiences-legal-empowerment>
- Kristriantono, P., & Yuliawati. (2022). Dampak Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Dan Tenaga Kerja Sektor Pertanian. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 18(2), 141–158. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jsep/article/download/20069/8021/64661>
- Landingham, G. Van, Silloway, T., Chang, V., Klein, M., White, D., & Davies, E. (2014). Evidence-Based policymaking: A guide for effective government. *Pew-MacArthur Results First Initiative*, 4–16. <http://www.pewtrusts.org/es/research-and-analysis/reports/2014/11/evidence-based-policymaking-a-guide-for-effective-government>
- Laverack, G., & Wallerstein, N. (2001). Measuring community empowerment: a fresh look at organizational domains. *Health Promotion International*, 16(2), 179–185. <https://doi.org/10.1093/heapro/16.2.179>
- Manaf, A., Purbasari, N., Damayanti, M., Aprilia, N., & Astuti, W. (2018). Community-Based Rural Tourism in Inter-Organizational Collaboration: How Does It Work Sustainably? Lessons Learned from Nglanggeran Tourism Village, Gunungkidul Regency, Yogyakarta, Indonesia. In *Sustainability* (Vol. 10, Issue 7, p. 2142). <https://doi.org/10.3390/su10072142>
- Mariska. (2024). Optimalisasi Peluang Green Jobs Melalui Penyiapan Tenaga Kerja Hijau. *Bappenas Working Papers*, VII(3), 227–242. <https://doi.org/10.47266/bwvp.v7i3.365>
- Meier, W. A., & Trappel, J. (2022). Media transparency: Comparing how leading news media balance the need for transparency with professional ethics. In *Success and failure in news media performance: Comparative analysis in the Media for Democracy Monitor 2021* (pp. 255–273). <https://doi.org/10.48335/9789188855589-12>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook and The Coding Manual for Qualitative Researchers*. SAGE.
- Moallemi, E. A., Malekpour, S., Hadjikakou, M., Raven, R., Szetey, K., Ningrum, D., Dhiaulhaq, A., & Bryan, B. A. (2020). Achieving the Sustainable Development Goals Requires Transdisciplinary Innovation at the Local Scale. *One Earth*, 3(3), 300–313. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.08.006>
- Muttaqin, Z., & Wahyun. (2019). Pemahaman dan Implementasi Ideologi Pancasila di Kalangan Generasi Muda. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, 7(2). <https://doi.org/https://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/1139/pdf>
- Nabilah, H., El-Tsana, A. V., & Wasir, R. (2025). Menutup Kesenjangan Kesehatan: Peningkatan Kesetaraan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan. *Indonesian Journal of Health Science*, 5(3), 511–518.
- Patadungan, E., & Octavia, F. (2025). The Effect of Work-Life Balance and Job Satisfaction on the Loyalty of Gen Z Employees in North Toraja Regency. *International Journal of Economics and Management Research*, 5(1), 265–282. <https://doi.org/10.55606/ijemr.v5i1.634>
- Pellegrini, M. (2021). *Evidence-Based Policies in Education : Initiatives and Challenges in Europe*. <https://doi.org/10.1177/2096531120924670>

- Pinilas, R., Gosal, R., & Kasenda, V. (2017). Partisipasi Generasi Muda dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus di Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Talaud). *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/18244/17774>
- Rahmiyati, N., Andayani, S., & Panjaitan, H. (2015). Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna di Kota Mojokerto. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen*, 2(2). <https://doi.org/10.30996/jmm17.v2i02.506>
- Rastrollo-Horrillo, M.-A., & Rivero Díaz, M. (2019). Destination social capital and innovation in SMEs tourism firms: an empirical analysis in an adverse socio-economic context. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(10), 1572–1590. <https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1648481>
- Rosyadi, S., & Indiahono, D. (2020). *Administrasi Publik New Normal*. SIP Publishing.
- Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.
- Safrida, Tjoetra, A., Lestari, R., & Safrida, N. (2022). Peran Stakeholder sebagai Aktor Kebijakan Pemberdayaan Kelompok Perempuan “Sepakat” melalui Potensi Lokal di Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 10(2), 416–433.
- Serageldin, I. (1996). *Sustainability and the Wealth of Nations First Steps in an Ongoing Journey*. The World Bank.
- Sieber, I. M., Carrasco, A. R., Molina, C. G. de, Prall, M., Tiwari, A., Ntemiri, S., Bunnefeld, N., & Cevallos, J. P. (2024). *Building Resilient Coastal Communities through Nature-based Solutions and Empowerment Tools A report of the Eclipse Expert Working Group on “ Building Resilient Coastal Communities through Nature-based Solutions and*. https://eclipse.eu/wp-content/uploads/2024/06/Eclipse-EmpowerUs-Report-1-24-Building-RCC_final2.pdf
- Susanti, & Erlin, K. (2025). Analisis Pengembangan Wilayah Berbasis Potensi Lokal sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Daerah di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1). <https://doi.org/10.59827/jie.v4i1.224>
- Syamsuadi, A., Febriani, A., Ermayani, Bunyamin, B., & Nursyamah. (2023). Peran Lintas Sektor dalam Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 6(1), 1–30. <https://jurnal.univrab.ac.id/index.php/jdp/article/view/3204/1385>
- Tang, J., Tosun, C., & Baum, T. (2020). Do Gen Zs feel happy about their first job? A cultural values perspective from the hospitality and tourism industry. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 32(12), 4017–4040. <https://doi.org/10.1108/IJCHM-04-2020-0261>
- Tanjung, D. S., Laia, A., Sitohang, D., Sinaga, D. J., & Situmorang, I. (2024). *Keterlibatan Pemuda Dalam Pembangunan Desa Partibi Lama Kecamatan Merek. 2*. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/aspirasi.v2i6.1202>
- Thompson, M. (2018). Social capital, innovation and economic growth. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 73, 46–52. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.01.005>
- UNDP. (2025). *Goal 10: Reduced inequalities*. <https://www.undp.org/sustainable-development-goals/reduced-inequalities>
- Vignola, R., Locatelli, B., Martinez, C., & Imbach, P. (2009). Ecosystem-based adaptation to climate change: what role for policy-makers, society and scientists? *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 14(8), 691–696. <https://doi.org/10.1007/s11027-009-9193-6>
- Wahyu, F., Muhammad, E., & Maimun, H. (2024). *The Influence of Flexible Work Arrangements and Work-Life Balance on Generation Z Career Development Mediated by Job Satisfaction*. 2011, 1373–1389. <https://doi.org/10.57178/jer.v9i1.2360>
- Yuliani, I., Ismail, A., Nazriah, A., & Yusuf, R. (2025). Optimizing Public Policy Evaluation Using Data and Evidence-Based Approaches for Sunan Kuning Semarang, *Indonesia Closure*. 12(2), 223–235.
- Yunas, N. S., & Nailufar, F. D. (2021). Pemberdayaan Ruang Inovasi Kabupaten Jombang Sebagai Komunitas Pemuda Penggerak Pembangunan Desa Dalam Optimalisasi Produk UMKM. *Surya Abdimas*, 5(4), 561–572. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v5i4.1371>
- Zheng, J., Wu, G., & Xie, H. (2017). Impacts of leadership on project-based organizational innovation performance: The mediator of knowledge sharing and moderator of social capital. *Sustainability (Switzerland)*, 9(10), 1–22. <https://doi.org/10.3390/su9101893>
- Zhou, L., Wall, G., Zhang, D., & Cheng, X. (2021). Tourism and the (re)making of rural places: The cases of two Chinese villages. *Tourism Management Perspectives*, 40, 100910. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100910>